

**DETERMINAN JUMLAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(RODA DUA) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E) pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ANJAS ASMARA
90300115134

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Anjas Asmara
NIM : 90300115134
Tempat/Tgl. Lahir : Polewali, 08 April 1996
Jur/Prodi/Konsentrasi : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Alamat : Jln. Tidung IX Setapak 15, Mappala,
Kec.Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Judul : Determinan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
(Roda Dua) di Kabupaten Polewali Mandar.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 November 2020

Penyusun,



Anjas Asmara
NIM. 90300115134



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong - Gowa . ■ 424835, Fax 424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *"Determinan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua) di Kabupaten Polewali Mandar"*, yang disusun oleh Anjas Asmara, NIM 90300115134, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 18 Maret 2020 bertepatan dengan 23 Rajab 1441, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata, 18 Maret 2020
23 Rajab 1441

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE, M.Si, Ak.	(.....)
Penguji I	: Dr. Hasbiullah, SE, M.Si.	(.....)
Penguji II	: Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Siradjuddin, SE, M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Bahrul Ulum Rusydi, SE, M.Sc.	(.....)

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt atas rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “*Determinan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua) di Kabupaten Polewali Mandar*”. Salam dan salawat selalu terpatrit dalam sanubari, sebagai haturkan doa kepada reformis sejati Rasulullah Muhammad saw, beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 (Strata 1) pada jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Proses penyusunan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendo’akan, membantu dan mendukung penulis sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan.

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D, Wakil Rektor I Prof. Dr. Mardan, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. Wahyuddin Naro, M.Pd, dan Wakil Rektor III Prof. Dr. Darusalam Syamsuddin, M.Ag, serta Wakil Rektor IV Dr. Kamaluddin Abunawas, M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Alauddin Makassar.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag. wakil Dekan I Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. wakil Dekan II Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag, dan Wakil Dekan III Dr. Amiruddin K, M.Ei. yang telah memberikan

kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

3. Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Ekonomi Dr. Hasbiullah, SE, M.Si dan Dr. Alim Syariati, SE.,M.Si Yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi selama penulis menempuh kuliah berupa ilmu, nasehat serta pelayanan sampai penulis dapat menyelesaikan kuliah.
4. Pembimbing I Dr. Siradjuddin, SE., M. Si dan Pembimbing II Bahrul Ulum Rusydi, SE., M.Sc yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, maupun dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
5. Munaqisy I Dr. Hasbiullah, SE, M.Si dan munaqisy II Sitti Aisyah, S.Ag., M.Ag., yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan staf Jurusan Ilmu Komunikasi beserta staf akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang banyak membantu dalam pengurusan ujian sarjana penulis.
7. Keluarga besar Ilmu Ekonomi angkatan 2015, khususnya saudara-saudariku IE (D) meskipun kita tidak sedarah tetapi kita tetap bersaudara Terima Kasih atas Kisahnya.
8. Untuk KKN Angkatan 60 yang telah memberikan pengalaman berharga selama sebulan lebih di Desa Rante Alang kecamatan Larompong Kabupaten Luwu.
9. Keluarga besar, Himpunan mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi (HMJ I.E), Pengurus Pusat Kerukunan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-

PM), Kerukunan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPM-PM) Cabang Binuang dan Ikatan Alumni SMAN 2 Polewali Mandar (IKA SMADA) Cabang Makassar. Terima kasih kalian selalu setia mendampingi, yang selalu meluangkan waktunya membagi ilmu, memberikan semangat dan keceriaan.

10. Teruntuk saudara-saudaraku Muh Anwar, Ruslam, Sahrul, Fadel Muhammad Abgan, Miftahul Jannah, Nurlela, Terima kasih atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restunya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
11. Saudara kandung Iga Intan Permata Sari dan Elisabeth Terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan dan doa restunya.
12. Kedua orang tua Ayah Alm.Sarman BW, Ibu Masturi. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dukungan dan doa restunya. Semoga Allah SWT memberikan umur yang panjang, ketenangan Dunia Akhirat dan kebarokahan amin

Akhir kata semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terutama adik-adik angkatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Samata-Gowa, April 2020

Penyusun,

Anjas Asmara

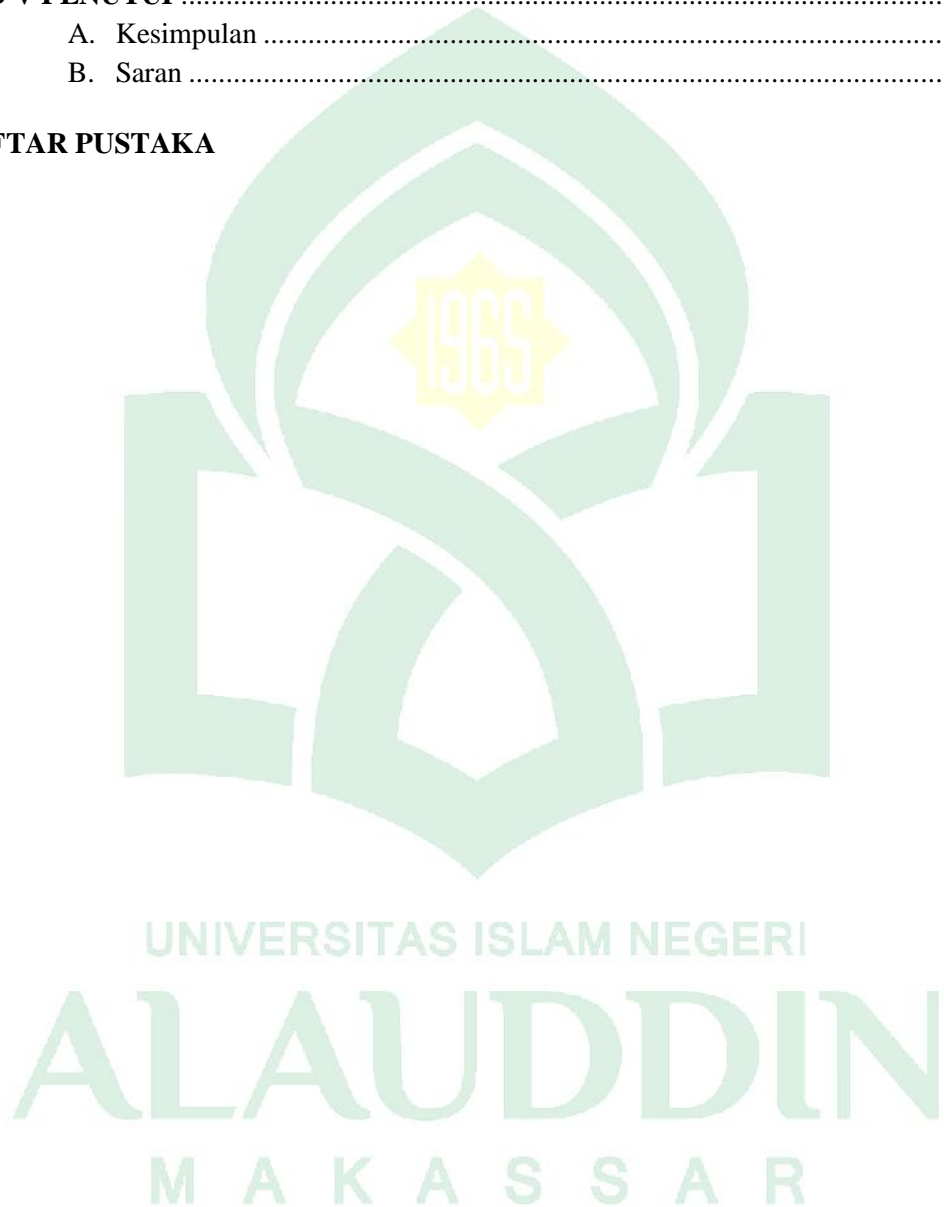
NIM. 90300115134

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Hipotesis.....	5
D. Definisi Operasional & Ruang Lingkup Penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Grand Theory	10
B. Pajak Kendaraan Bermotor	21
C. Pendapatan Perkapita	24
D. Jumlah Kendaraan Bermotor.....	28
E. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar	39
B. Perkembangan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar	41
C. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten	

Polewali Mandar	43
D. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar	45
E. Hasil Analisis Data.....	47
F. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

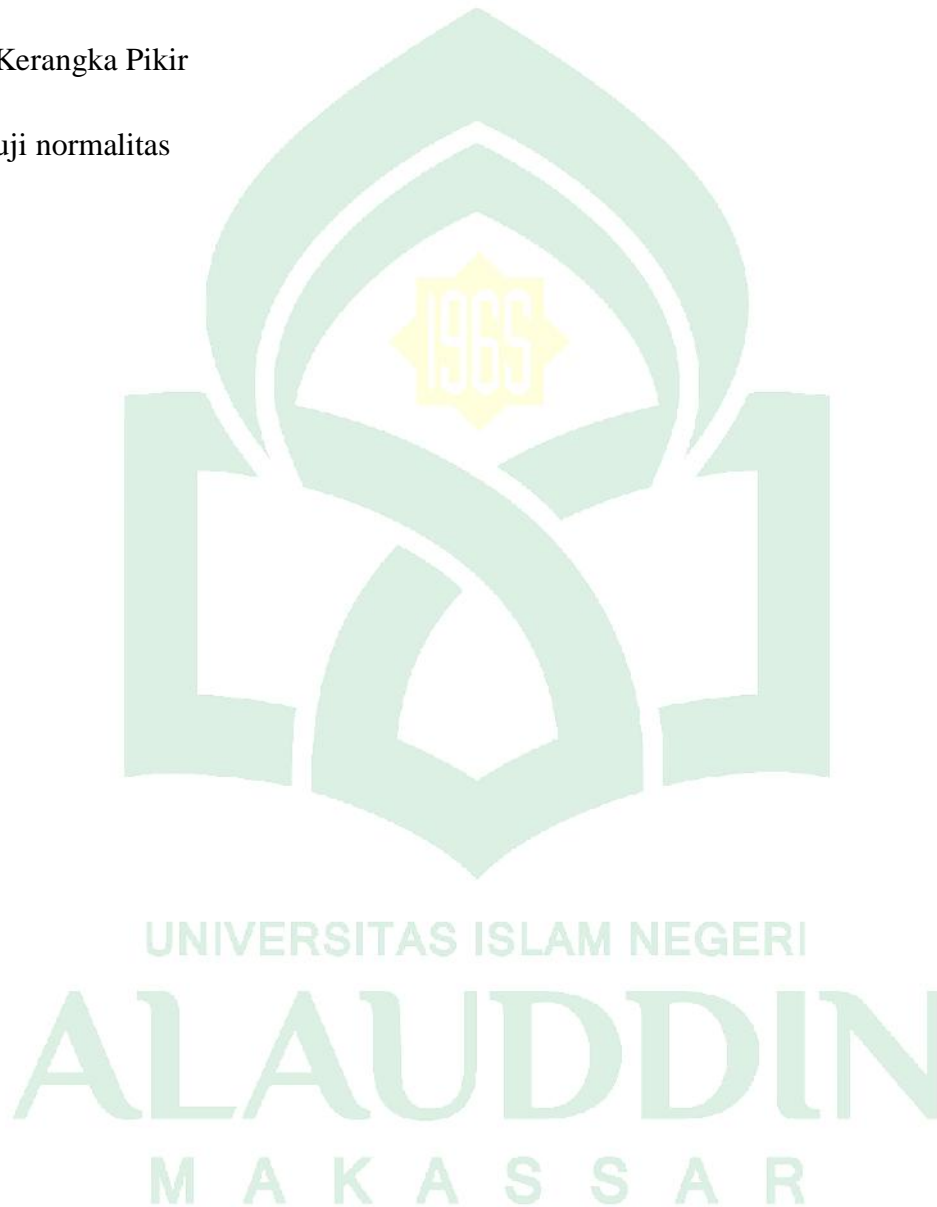


DAFTAR TABEL

No.	Teks	halaman
1.1	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (roda dua) Kabupaten Polewali Mandar	2
1.2	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Polewali Mandar	3
1.3	Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua Kabupaten Polewali Mandar	4
1.4	Penelitian Terdahulu	7
4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar	39
4.2	Perkembangan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali mandar	41
4.3	Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Polewali Mandar Tahun	42
4.4	Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar	44
4.5	Uji Multikolinieritas	46
4.6	Uji Heterokedastisitas	47
4.7	Hasil Uji Autokorelasi	47
4.8	Hasil Uji Regresi	48
4.9	Uji Koefisien Determinasi	50
4.10	Hasil Uji F (Simultan)	50
4.11	Uji T Statistic	51

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	halaman
2.1	Curve marginal utility of return	12
2.2	Marjinal Utilitas dan Total Utilitas	14
2.3	Kerangka Pikir	30
4.1	uji normalitas	45



ABSTRAK

Nama : Anjas Asmara

Nim : 90300115134

Judul : Determinan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (RodaDua) di Kabupaten Polewali Mandar.

Penelitian ini membahas tentang seberapa besarpengaruh pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Sumber data yaitu data sekunder atau penelitian secara tidak langsung dengan teknik pengumpulan data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia dan studi pustaka. Teknik analisis data yaitu dengan cara analisis linear berganda dengan menggunakan model log-lin.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable pendapatan perkapita berpengaruh signifikan terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar, untuk variable jumlah kendaraan bermotor menunjukan pengaruh yang tidak signifikan di Kabupaten Polewali Mandar.

Implikasi penelitian ini sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah terkhusus untuk aparat pajak di Kabupaten Polewali Mandar untuk lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan masih terlambat dalam membayar pajak.

Kata Kunci : Jumlah pajak kendaraan bermotor, pendapatan perkapita, jumlah kendaraan Bermotor.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang dengan giat terus melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, yaitu dengan memajukan kesejahteraan umum. Penerimaan pajak yang semakin meningkat menyebabkan pendapatan belanja pemerintah juga semakin meningkat, sehingga pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat.

Agar pertumbuhan dapat terus berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, dibutuhkan dana dalam jumlah yang sangat besar. Karena itu, pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan pendapatan sehingga menunjang pembangunan. Adapun sumber penerimaan pemerintah, yaitu berasal dari sektor pajak. Dimana pajak merupakan salah satu penerimaan bagi tiap daerah yang sangat besar kontribusinya dalam membiayai kebutuhan belanja tiap daerah dan untuk pembangunan nasional. Selain dari itu, peran dan tanggung jawab masyarakat dalam keikutsertaannya dalam pembangunan sangat diharapkan, salah satunya peran dari masyarakat yaitu sebagai wajib pajak yang baik, yang secara sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah salah satu masalah yang sering muncul dikalangan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut dapat dilihat dalam data jumlah pajak kendaraan bermotor di kabupaten Polewali Mandar

yang masih mengalami peningkatan yang tidak menentu dari tahun ke tahun (berfluktuatif), hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (roda dua) Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Tahun	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
2014	15.245.827.095
2015	17.566.672.527
2016	16.126.170.079
2017	18.668.979.995
2018	18.870.678.647

Sumber: Samsat Polewali Mandar, 2020

Dari data di atas menjelaskan bahwa pada tahun 2014 jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar mencapai Rp.15.245.827.095 yang kemudian pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.17.566.672.527, namun di tahun berikutnya 2016 mengalami penurunan Rp.16.126.170.079. Dimana pada tiga tahun tersebut masih fluktuatif. Peningkatan jumlah pajak kendaraan bermotor tertinggi terjadi pada dua tahun berikutnya yaitu 2017 dan 2018.

Disamping itu, salah satu faktor yang menjadi pendukung untuk meningkatkan jumlah pajak kendaraan bermotor adalah pendapatan perkapita baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian

kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018 (Rupiah)

Tahun	Perkembangan Pendapatan Perkapita
2014	6.772.589
2015	7.255.658
2016	7.797.405
2017	8.356.341
2018	8.878.283

Sumber: BPS Polewali Mandar (data diolah), 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan perkapita Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pendapatan perkapita paling rendah di tahun 2014 dengan kisaran Rp.6.772.589, hal tersebut lebih rendah bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun pendapatan perkapita tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar Rp.8.878.283.

Salah satu pajak yang sangat berpotensi memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, dilihat dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh para penduduk Polewali Mandar. Seiring dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor pada kabupaten Polewali Mandar, maka kontribusi dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor juga akan terus diupayakan dalam meningkatkannya sehingga akan sangat membantu dalam pembangunan pada Kabupaten Polewali Mandar.

Pada tabel 1.3 menggambarkan jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang ada di kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 1.3
Perkembangan Jumlah Kendaraan Roda Dua di Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2014-2018 (unit)

Tahun	Jumlah Kendaraan Roda Dua
2014	40.275
2015	41.889
2016	39.860
2017	39.671
2018	40.999

Sumber: Samsat Polewali Mandar, 2020

Berdasarkan tabel di atas bahwa jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2014 berjumlah 40.275 yang kemudian mengalami peningkatan dengan besaran 41.889 di tahun 2015, namun di dua tahun berikutnya yaitu 2016 dan 2017 mengalami penurunan, dimana tahun 2016 mencapai 39.860 hingga mencapai level terendah di tahun 2017 dengan angka 39.671. Dimana selanjutnya pertumbuhan tertinggi kembali terjadi pada tahun 2018 hingga menyentuh pertumbuhan sebesar 41.889. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak pada jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar itu sendiri.

Dilihat dari beberapa data jumlah pajak kendaraan bermotor, yang mana di tiga tahun terakhir yaitu tahun 2014 sampai 2016 mengalami pertumbuhan yang berfluktuatif. Hal ini terlihat pada tahun 2014 dengan jumlah terendah yang

kemudian di tahun 2015 mengalami peningkatan dimana kemudian kembali mengalami penurunan pada tahun 2016, hal tersebut menjelaskan peningkatan yang tidak menentu (fluktuatif) yang tentunya dapat menghambat penerimaan pemerintah untuk kemudian dialokasikan ke pembangunan daerah itu sendiri. Serta adanya pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan yang tidak menentu dari tahun ke tahun dapat pula mempengaruhi penerimaan jumlah pajak kendaraan di daerah tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “*Determinan jumlah pajak kendaraan Bermotor (Roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan perkapita berpengaruh terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (Roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Apakah Jumlah kendaraan bermotor (Roda dua) berpengaruh terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (Roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar ?

C. Hipotesis

Hipotesis berasal dari dua kata yaitu hypo (belum tentu benar) dan tesis (kesimpulan). Mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua variabel yang di ungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat di uji. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

H_1 = Pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar.

H_2 = Jumlah kendaraan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar.

D. Definisi Operasional & Ruang Lingkup Penelitian

1. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan beberapa pengertian yang terdapat dalam judul adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Jumlah pajak kendaraan bermotor (Y) merupakan penerimaan pajak dalam setiap tahunnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dibayar setiap tahun dan pajak yang dibayarkan lima tahun sekali (ditandai dengan pergantian plat nomor kendaraan dan STNK) satuan dari variabel ini yaitu (Rupiah).

b. Variabel Independen

Pendapatan perkapita (X_1) merupakan besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara atau kemampuan keuangan individu dalam memenuhi segala kebutuhannya. Jika individu tersebut dapat memenuhi semua kebutuhan tersebut, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier berdasarkan pendapatan yang dimiliki tanpa bantuan dari pihak luar berupa pinjaman, dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan individu tersebut sangat baik. Satuan dari variabel ini yaitu (Rupiah).

Jumlah kendaraan bermotor (X2) merupakan total volume kendaraan yang terdata setiap tahunnya dan dikumpulkan berdasarkan metode pendaftaran yang didapat dari kantor kepolisian. Satuan dari variabel ini yaitu (unit).

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk menghindari penyimpangan dan perluasan yang tidak perlu dalam penelitian, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yaitu: faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah pajak kendaraan bermotor (roda dua) diantaranya pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung landasan teori dalam penelitian ini, maka sangat diperlukan adanya hasil dari penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Alfonso T Hadi. (2015)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) Kabupaten Seluma.	hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan atau pendapatan perkapita menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pajak dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, terlihat dari posisi bahwa kemampuan dalam membayar pajak itu dipengaruhi oleh tingkat pendapatan dan faktor persepsi sanksi dan pengetahuan tentang persyaratan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Seluma.

2	Amanda R. Siswanto Putri, I Ketut Jati.	Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kendaraan dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Denpasar	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah kendaraan, kewajiban moral, kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor bersama SAMSAT Denpasar.
3	Ketut Evi Susilawati, Ketut Budiarta.	Pengaruh pendapatan, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan akuntabilitas pelayanan pajak publik pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Singaraja.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pendapatan, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada jumlah pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang akan di capai pada penelitian ini adalah :

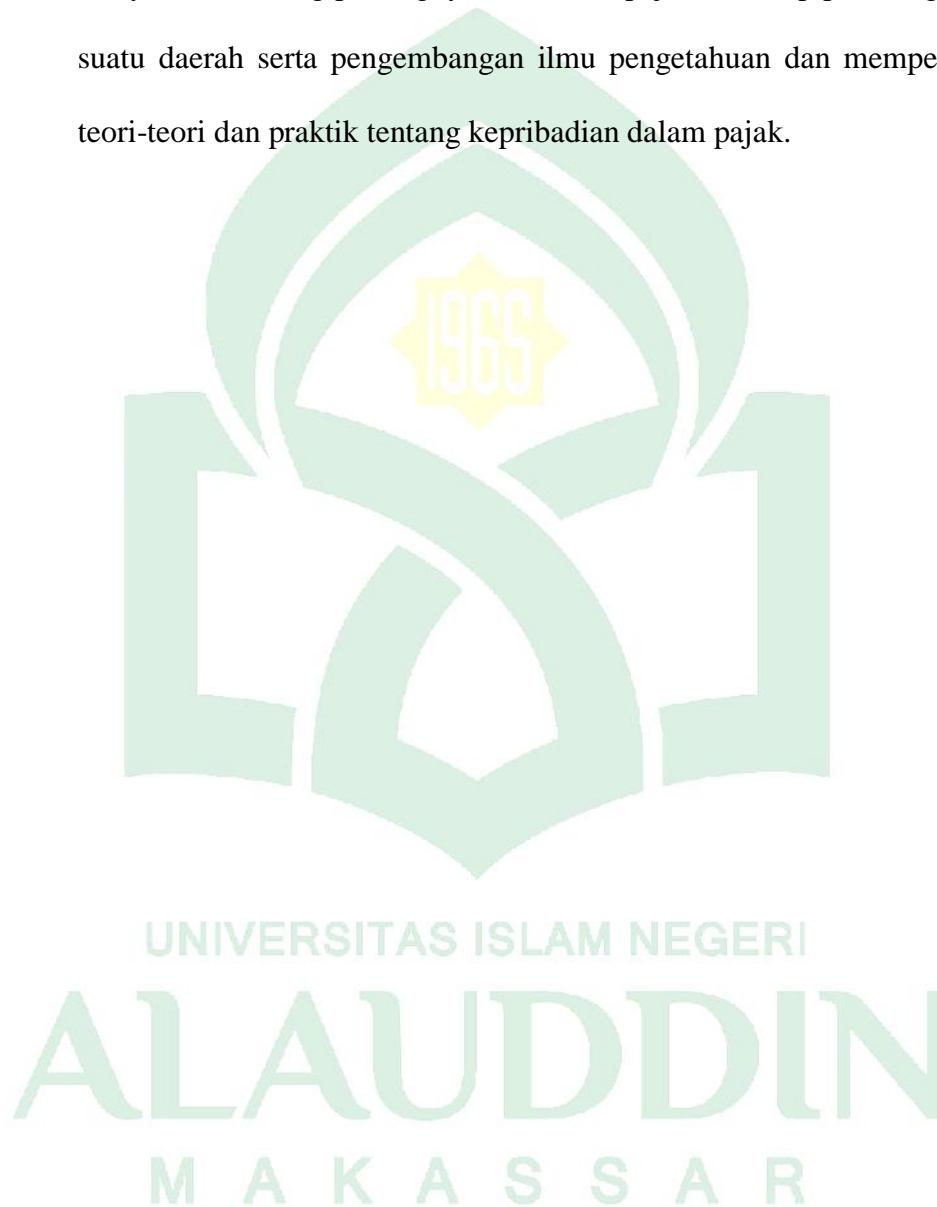
- a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan perkapita terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah kendaraan bermotor (roda dua) terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor (roda dua) di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi instansi, sebagai salah satu bahan acuan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.

- b. Bagi Akademisi, sebagai bahan bacaan atau referensi dan tambahan untuk penelitian yang akan datang.
- c. Bagi publik, penelitian ini diharapkan bisa memberi kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan suatu daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan memperkuat teori-teori dan praktik tentang kepribadian dalam pajak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Grand Theory*

1. Teori Barang Publik

Penyediaan barang-barang publik biasa dilakukan oleh pemerintah barang-barang publik yang disediakan dan dilakukan oleh pemerintah yakni seperti jalan raya, pertahanan nasional dan lain-lain. Sedangkan barang swasta juga dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Seperti kereta api, jasa penerbangan, dan lain-lain. Barang-barang swasta tersebut bukan semata-mata murni hasil dari pihak swasta, melainkan pihak pemerintah juga turut andil dalam pembiayaan atau anggaran pembuatannya. Pihak swasta hanya menjadi pekerja dalam segala proyek pembuatan barang-barang tersebut.

Teori Pigou membahas tentang penyediaan barang publik yang dibiayai dengan pajak yang dipungut dari masyarakat. Menurut Pigou, barang publik harus disediakan didalam suatu tempat dimana kepuasan marginal masyarakat akan publik sama besarnya dengan ketidakpuasan marginalnya akan pajak yang dipungut dari mereka untuk membiayai program-program pemerintah akan barang publik.

Artinya semakin banyak anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi barang publik, maka tingkat kepuasan marginal akan semakin menurun, dengan kata lain akan menimbulkan *marginal disutility*, karena pastinya pemerintah menarik pajak kepada mereka demi membangun barang tersebut. Sedangkan kita tahu bahwa pajak adalah hal yang paling tidak disukai masyarakat. Pemerintah diharapkan

untuk memperkecil anggaran untuk membangun barang-barang publik sehingga kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

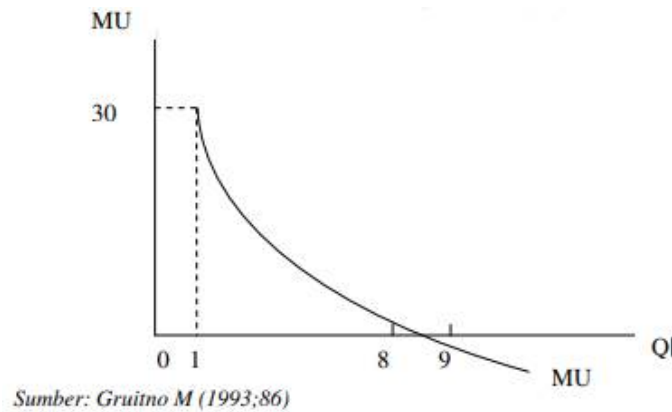
Namun adapun kelemahan analisa dari Pigou didasarkan pada ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan rasa kepuasan marginal akan barang publik, sedangkan kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal.

Arti pajak dan barang publik telah dijelaskan secara singkat diatas, sebagaimana kita ketahui bahwa manakala jumlah penerimaan pajak meningkat, maka pendapatan suatu negara atau daerah akan meningkat, apalagi daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam yang memadai, maka pajak merupakan penerimaan daerah yang potensial. Karena Indonesia menganut demokrasi sosialis barang publik merupakan barang yang harus disediakan oleh pemerintah, karena pihak swasta tidak mau karena tidak mendapat keuntungan dari pembuatan fasilitas umum yang gratis.

Dalam kondisi pendapatan pajak yang relative tinggi, maka secara teoritis untuk membiayai fasilitas umum yang memadai maka pemerintah menggunakan pajak untuk menjadi pembiayaan pembuatan fasilitas publik tersebut, bukan saja karena masyarakat banyak membutuhkan fasilitas yang baik, tapi dari pihak pemerintah juga menginginkan dengan fasilitas yang bagus maka dimungkinkan investor atau wisatawan akan banyak yang mau datang kedaerah kita.

Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan

marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program pemerintah (menyediakan barang publik).



Gambar 2.1 Curve marginal utility of return

Pada Gambar 2.1 menggambarkan kurva kepuasan akan barang publik. Kurvatersebut mempunyai bentuk menurun yang menunjukkan bahwa semakin banyakbarang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah kepuasan marginalnyayang dirasakan masyarakat. Saat barang publik yang disediakan ditambah olehpemerintah dari 8 unit menjadi 9 unit, maka tambahan manfaat yang dirasakanoleh masyarakat semakin berkurang karena harus membayar pajak yang semakinbesar.

2. Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terlibat dalam mendapatkan dan mempergunakan barang-barang dan jasa tersebut didalamnya proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan-kegiatan tersebut, Basu Swastha Dharmmesta dan Hani Handoko (2011:10).

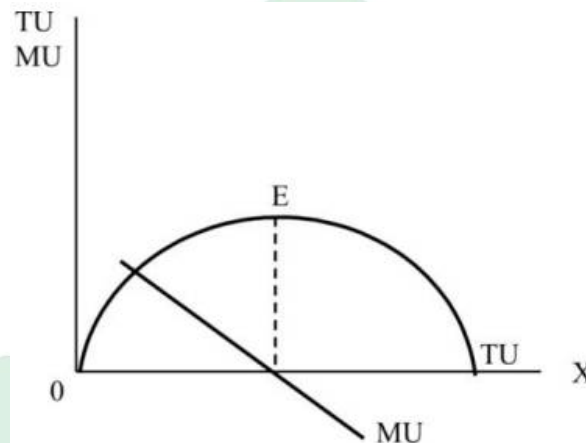
Menurut Safri Nurmantu, (2005:55) Keberadaan pajak dapat merubah perilaku konsumen, dapat mendorong kegiatan atau sebaliknya dapat menghambat kegiatan tertentu. Pungutan pajak yang tinggi atas barang mewah, dan pembebasan pajak atau tarif yang rendah terhadap barang-barang tertentu pada umumnya akan mendorong konsumen untuk tidak mengkonsumsi barang mewah tetapi sebaliknya akan mengkonsumsi barang yang dikenakan dengan tarif pajak rendah.

Sehingga, para pembuat kebijakan pajak di tingkat lokal, provinsi, negara bagian hingga tingkat federal atau nasional, seringkali tergoda atau membuat kebijakan menaikkan atau kadang menurunkan tarif pajak demi memacu perekonomian sekaligus memperbesar pendapatan pemerintah, M Yunanto, (2011:9).

Oleh karena itu, dapat kita katakan perilaku konsumen adalah suatu tindakan langsung yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk atau jasa dengan harapan dapat memuaskan kebutuhan mereka.

Barang dan jasa diperlukan manusia (konsumen) karena kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan manusia. Apabila konsumen mengonsumsi barang dalam jumlah yang semakin banyak maka total kepuasannya (*Total Utility*, TU) akan semakin tinggi. Namun demikian, tambahan kepuasan atau kepuasan marjinal (*Marginal Utility*, MU) cenderung semakin menurun. Kepuasan marjinal adalah tambahan kepuasan yang diperoleh karena menambah mengonsumsi 1 unit

barang atau jasa, atau perubahan TU per unit perubahan jumlah yang dikonsumsi. Dengan demikian, apabila konsumen mengonsumsi barang dalam jumlah semakin banyak maka kepuasan totalnya semakin meningkat, namun dengan laju yang semakin rendah. Lihat Gambar berikut ini.



Gambar 2.2 Marjinal Utilitas dan Total Utilitas

Titik puncak atau kepuasan tertinggi (titik E) yang dapat dicapai oleh konsumen dari mengonsumsi suatu barang dinamakan titik kepuasan maksimum (*saturation point*). Apabila konsumen mengonsumsi barang melebihi titik ini maka kepuasan total akan menurun. Dari Gambar 2.2, pada awalnya TU terlihat meningkat dengan laju yang semakin rendah, mencapai puncak, kemudian menurun. MU adalah *slope* dari TU, menurun, mencapai nol, kemudian negatif sesuai dengan bentuk TU. *Slope* MU yang bernilai negatif menunjukkan adanya hukum tambahan kepuasan yang semakin menurun (*Law of diminishing marginal utility*).

Ingat bahwa fungsi kepuasan ini hanya berlaku bagi seseorang dan mencerminkan preferensi dari orang yang bersangkutan. Dengan demikian, akan berbeda untuk orang lain dan barang lain. Demikian pula, fungsi ini hanya berlaku

untuk waktu tertentu, dapat berubah pada saat yang lain. Selain itu, dianggap bahwa jumlah barang lain yang dikonsumsi adalah tetap.

Dalam gambar di atas, kepuasan diukur dengan satuan util. Satuan ini merupakan pengukuran secara kardinal (dapat dinyatakan dalam angka). Kepuasan juga dapat diukur secara ranking (ordinal). Kepuasan ordinal hanya menyatakan ranking dari kepuasan mengkonsumsi barang atau sekumpulan barang. Dalam hal ini, kita hanya menyatakan bahwa satu barang atau sekumpulan barang akan memberikan kepuasan yang lebih tinggi dari barang atau sekumpulan barang yang lain.

3. Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo, (2009:2), pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang wajib/dipaksakan) yang tentang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari kedua definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Perbedaan mengenai kedua definisi tersebut hanya pada penggunaan gaya bahasa atau kalimatnya saja. jadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

a) Teori Pemungutan Pajak

- (1) Teori kewajiban pajak mutlak (teori bakti) negara dibentuk karena ada persekutuan individu, oleh karena itu individu harus membaktikan dirinya pada negara berupa pembayaran pajak. Dasar hukum pajak ialah terletak dalam hubungan rakyat dengan negara.
- (2) Teori asuransi, negara bertugas melindungi rakta dan harta bendanya. Oleh Karena itu, rakyat harus membayar premi pada negara berupa pajak. Tetapi sebetulnya negara memberikan ganti rugi andaikan terjadi musibah.
- (3) Teori kepentingan, pemungutan pajak didasarkan pada kepentingan orang demi negara. Makin banyak membutuhkan kepentingan, makin besar pula pajaknya.
- (4) Teori gaya pikul, bahwa pajak dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang, dan untuk mengukur gaya pikul, selain besarnya penghasilan dan kekayaan juga besarnya pengeluaran seseorang. Gaya pikul adalah besarnya kekuatan seseorang untuk dapat

mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya, setelah dikurangi dengan yang mutlak untuk kebutuhan yang primer.

b) Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut pendapat para ahli, untuk mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli mengemukakan tentang asas pemungutan pajak.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of nations* dengan ajaran yang terkenal "*The Four Maxims*", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

- (1) Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
- (2) Asas Certainty (asas kepastian hukum), semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
- (3) Asas Convenience of payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan), pajak harus dipungut pada saatnya yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya saat bagi wajib pajak menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak hadiah.

(4) Asas Efficiency (asas efisien atau asas ekonomi), biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang besar dari hasil pemungutan pajak.

c) Pemungutan Pajak

Dalam hal pemungutan pajak ada 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

(1) Official assessment System

Adalah sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak, ciri-cirinya:

(a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. (b). Wajib pajak bersifat pasif. Dan (c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) Self Assessment System

Adalah suatu sistem yang pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, cirri-cirinya yaitu: (a). Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. (b). Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. (c). Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

(3) Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan sebuah besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya

adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Adapun pajak dalam pandangan islam dalam surah At-Taubah ;

29, surah Al-Maidah : 8 dan surah An-Nisa : 29 sebagai berikut;

At-Taubah : 29

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”

Pada masa khulafaur Rasyidin juga menerapkan pajak seperti halnya Rasulullah saw. Abu Bakar As-Shiddiq juga melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan, sebagai dibagikan kepada kaum Muslimin dan sebagian yang lain tetap menjadi tanggapan negara. Disamping itu, ia juga mengambil alih tanah-tanah dari orang yang murtad untuk kemudian dimanfaatkan demi kepentingan umat islam secara keseluruhan. Selama masa pemerintahan Abu Bakar As-Shiddiq, harta Baitul Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikan kepada seluruh kaum muslimin, bahkan ketika Abu Bakar As-Shiddiq wafat, hanya ditemukan satu dirham dalam perbendaharaan negara. Seluruh kaum muslimin mendapat manfaat yang sama dan tidak ada seorang pun yang dibiarkan dalam kemiskinan.

Al-Mā'idah : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Prinsip ekonomi islam tentang denda pajak apabila ditinjau dari prinsip ekonomi keadilan juga diperbolehkan karena seorang muslim wajib memenuhi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini denda pajak termasuk dalam kewajiban setiap muslim yang wajib tunduk dengan perintah dari pemerintah sebagai amirul mukminin.

An-Nisā : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut di atas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai aturan.

(d) Fungsi Pajak

Fungsi Pajak Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan Negara) dan fungsi regulierend (mengatur).

(1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara); Pajak mempunyai

fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi Dan Bangunan, dan lain-lain.

(2) Fungsi Regulierend (Mengatur); Pajak mempunyai fungsi mengatur

artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur adalah: (a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. (b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan. (c) Tarif pajak ekspor adalah 0%, dimaksudkan agar

para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga akhirnya dapat memperbesar divisa negara. (d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu. (e) Pembebasan Pajak Penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi yang di peroleh sehubungan dengan transaksi dengan anggota, di maksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia. (f) Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

B. *Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor*

Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraltan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak).

Menurut Saidi (2010: 51) Pajak Kendaraan Bermotor atau yang disingkat PKB merupakan salah satu jenis pajak daerah provinsi. Pengertian pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PDRD adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam arti pajak

kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak dan berada dalam kepemilikan dan/atau penguasaan wajib pajak.

Sejarah Pajak Kendaraan Bermotor Semula sesuai dengan UU No. 18 tahun 1997 ditetapkan Pajak Kendaraan Bermotor, di mana pajak atas PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) & PKAA (Pajak Kendaraan Diatas Air) dicakupkan. Seiring dengan perubahan UU No. 18 tahun 1997 menjadi UU No. 34 tahun 2000, terminologi kendaraan bermotor diperluas dan dilakukan pemisahan secara tegas menjadi Kendaraan Bermotor dan di Kendaraan Atas Air. Hal ini membuat Pajak Kendaraan Bermotor diperluas menjadi PKB & PKAA. Dalam praktiknya jenis pajak ini sering di bagi atas 2, yaitu PKB dan PKAA. Hal ini wajar saja mengingat kendaraan bermotor pada dasarnya berbeda dengan kendaraan di atas air.

Pengenaan PKB & PKAA tidak mutlak ada pada seluruh daerah provinsi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak provinsi. Untuk dapat dipungut pada suatu daerah provinsi pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang PKB, yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan PKB & PKAA di daerah provinsi yang bersangkutan. Pemerintah provinsi diberi kebebasan untuk menetapkan apakah PKB ditetapkan dalam satu peraturan daerah atau ditetapkan dalam dua peraturan daerah terpisah (Utami, 2014).

Dalam pasal 4 UU No.28 Tahun 2009, subjek atas kendaraan bermotor yaitu:

- a) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.
- b) Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- c) Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

- a) Dasar hukum Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagaimana berikut ini:
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- c) Peraturan daerah provinsi yang mengatur tentang PKB. Peraturan daerah ini dapat menyatu, yaitu satu peraturan daerah untuk PKB, tetapi dapat juga dibuat secara terpisah misalnya Peraturan Daerah tentang PKB.
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2006 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006
- e) Peraturan Gubernur tentang PKB sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang PKB pada provinsi.

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor PKB terutang harus dilunasi/dibayar sekaligus dimuka untuk masa dua belas bulan. PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 hari sejak diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah. Pembayaran PKB dilakukan ke kas daerah bank, atau tempat lain yang ditunjuk oleh gubernur, dengan menggunakan surat setoran pajak daerah. Wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak diberikan tanda bukti pelunasan atau pembayaran pajak dan Penning. Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi yaitu :

- a) Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKPD dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% dari pokok pajak.
- b) Keterlambatan pembayaran pajak sebagai mana ditetapkan dalam SKPD yang melampaui 15 hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak.

Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran, gubernur atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penghasilan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, surat Keputusan

Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah

C. *Pendapatan Perkapita*

Pendapatan dapat dipengaruhi oleh Modal atau pendanaan (financing) yang mengakibatkan adanya tambahan, Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan, Hadiah, sumbangan atau temuan, dan Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa. Chariri (2007:297).

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001), bahwa dalam pengertian ekonomi, pendapatan dapat berbentuk pendapatan nominal dan pendapatan riil. Pendapatan nominal adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah satuan uang yang diperoleh. Sedangkan pendapatan riil adalah pendapatan seseorang yang diukur dalam jumlah barang dan jasa pemenuh kebutuhan yang dapat dibeli, dengan membelanjakan pendapatan nominalnya (uangnya).

Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Pendapatan adalah tanggungan jumlah uang atau nilai yang selama tahun takwim diperoleh seseorang dari:

- a) Usaha dan tenaga,
- b) Barang tak bergerak,
- c) Harta bergerak,
- d) Hak atas pembayaran berkala dan,

- e) Tambahan harta yang ternyata dalam tahun takwin kecuali jika hal sebaliknya dibuktikan oleh wajib pajak (Isawati, Soegiarto, Ruliana, 2015).

Menurut Biro Pusat Statistik membagi pendapatan menjadi tiga kategori yaitu pendapatan berupa uang, pendapatan berupa barang, dan penerimaan yang bukan merupakan pendapatan,

- 1) Pendapatan berupa uang, terbagi menjadi empat yaitu: (a) Gaji dan upah (kerja pokok, kerja sampingan, kerja lembur dan kerja kadang-kadang); (b) Usaha sendiri (hasil bersih dari usaha sendiri, komisi, penjualankerajinan rumah); (c) Hasil investasi (hak milik tanah); dan (d) Keuntungan sosial yaitu pendapatan yang diperoleh dari kerjasosial.
- 2) Pendapatan berupa barang, terbagi menjadi dua yaitu: (a) Pembayaran upah dan gaji dalam bentuk beras, pengobatan, transportasi, perumahan, rekreasi; (b) Barang yang diproduksi dan dikonsumsi di rumah, yaitu pemakaian barang yang diproduksi di rumah, dan sewa yang seharusnya dikeluarkan terhadap rumah sendiri yang ditempati.
- 3) Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan, yaitu: (a) Pengambilan tabungan; (b) Penjualan barang-barang yang dipakai; (c) Penagihan piutan; (d) Pinjaman uang; (e) Kiriman uang; (f) Hadiah/pemberian; (g) Warisan; dan (h) Menang judi.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pendapatan atau penerimaan seseorang tidak hanya didapat dari kegiatan usaha formal saja seperti bekerja namun pendapatan bisa didapat dari investasi berupa kepemilikan tanah, sawah atau bisa bangunan properti. Pendapatan pula diberikan tidak hanya dalam bentuk

uang saja, namun dapat berupa barang seperti beras. Terdapat pula penerimaan yang tidak dikatakan sebagai pendapatan, karena penerimannya bukan atas kegiatan usaha.

Pendapatan yang diterima seseorang berbagai macam jenisnya, pendapatan tersebut digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu terbagi menjadi tiga, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Besar-kecilnya pendapatan yang diperoleh masyarakat akan mempengaruhi kebutuhan mereka, dalam keluarga yang miskin hampir seluruh penghasilan akan habis untuk kebutuhan primer makanan.

Masyarakat yang pendapatannya hanya cukup untuk kebutuhan primernya saja, akan sulit jika dia harus memenuhi kebutuhan lainnya yang lebih tinggi, namun ketika masyarakat mengalami penghasilan yang bertambah, maka pengeluaran mereka akan semakin bertambah.

Saat seseorang memiliki pendapatan atau penghasilan yang rendah, untuk mengikuti suatu kewajiban yang dibebankan akan mengalami kesulitan, atau dapat dikatakan mereka akan sulit untuk mematuhi. Namun, saat pendapatan mereka tinggi, kebutuhan mereka akan mudah untuk terpenuhi dan akan dapat memenuhi kewajiban yang telah dibebankan, karena melihat dari pendapatan yang cukup untuk kebutuhan dan kewajibannya.

Variabel pendapatan ini akan digunakan pada penelitian di Kecamatan Binuang, di mana akan dianalisis apakah pendapatan atau penghasilan akan mempengaruhi seseorang untuk membayar pajaknya. Diketahui dari beberapa

pendapat di atas, bahwa besar kecilnya pendapatan akan berpengaruh pada kemauan seseorang dalam membayar pajaknya. Kita ketahui, bahwa sistem perpajakan yang baik, sanksi yang tegas, sosialisasi yang baik tetap tidak bisa terlaksana suatu kepatuhan, jika pada diri wajib pajak itu sendiri penghasilan atau pendapatan yang mereka peroleh tidak mencukupi untuk membayar pajak.

D. *Jumlah Kendaraan Bermotor (Roda Dua)*

Sepeda motor merupakan alat transportasi yang murah, praktis, dan efisien dibandingkan dengan alat transportasi lain. Hal ini yang menyebabkan sepeda motor tetap diminati oleh masyarakat, dan bahkan permintaan sepeda motor semakin meningkat.

Kendaraan Bermotor atau kendaraan roda dua adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang adapada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan di atas rel. (Pasal 1 Angka 1 Huruf b UU Nomor 3 Tahun 1965 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya).

Kendaraan Bermotor atau kendaraan roda dua adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel. (Pasal 1 Angka 8 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan).

Besarnya peluang pangsa pasar sepeda motor di Indonesia membuat perusahaan sepeda motor saling berlomba untuk meningkatkan pangsa pasar mereka dari berbagai merek. Promosi sepeda motor pun ditingkatkan sesuai perusahaan, asuransi kredit motor pun saling bersaing untuk mendapatkan

konsumen (Mirza, 2007). Persaingan tersebut menyebabkan kemudahan dalam mendapatkan sepeda motor. Sepeda motor dapat dibeli dengan kredit dengan system yang lebih mudah, harga cicilan yang menarik dan bunga ringan (dari perusahaan asuransi).

Jumlah Kendaraan Bermotor atau kendaraan roda dua adalah semua kendaraan yang beroda dua atau lebih yang didarat digunakan untuk mengangkut barang dan atau orang yang digerakkan dengan motor yang dijalankan dengan bensin, dengan minyak lain atau gas yang ada dalam lalu lintas bebas (Diluar daerah pengawasan pabean) dalam tahun 1962. (Pasal 1 ke-1 UU Nomor 3 Tahun 1963 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa No. 13 Tahun 1962 Tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962).

E. Kerangka Pikir

Dalam membangun suatu daerah, diperlukan masukan dana yang sangat besar. Oleh karena itu, pajak daerah memiliki peran yang sangat vital dalam pembangunan daerah sebagai sumber pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembangunan daerah.

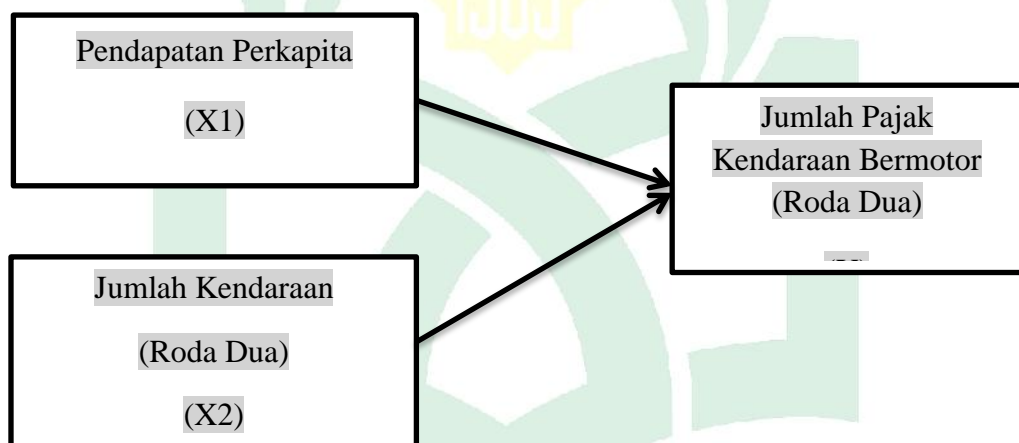
Di Kabupaten Polewali Mandar, jumlah penggunaan kendaraan bermotor mengalami peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang sangat berpotensi untuk memberikan penerimaan bagi pemerintah khususnya kabupaten Polewali Mandar.

Pendapatan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ketika pendapatan atau penghasilan seorang individu meningkat maka kecenderungan seorang individu dalam

membayar pajak juga akan ikut meningkatkan pendapatan pemerintah yang pada akhirnya belanja pemerintah pada pemenuhan kebutuhan pembangunan infrastruktur juga akan mengalami peningkatan, dimana akan memberikan tingkat kepuasan layanan publik pada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka adapun yang menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.3
Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini bertujuan menguraikan secara menyeluruh komponen-komponen yang berkaitan dengan analisis yang digunakan serta konsep tentang pelaksanaan penelitian. Jadi bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis.

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan Kuantitatif, yaitu metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah terhadap keputusan ekonomi. Pendekatan metode ini berangkat dari data lalu diproses menjadi informasi yang berharga bagi pengambilan keputusan.

Dimana dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat maka digunakan model ekonometrika yaitu suatu pendekatan keilmuan dalam penggunaan dan pengembangan metode matematika, statistika untuk mengestimasi hubungan antara variabel-variabel yang diproses dengan data yang telah ada. Dalam Metode ini juga harus menggunakan alat bantu berupa *Eviews* untuk mengolah data tersebut, Dengan metode kuantitatif maka akan diperoleh signifikansi perbedaan antara kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel.

B. *Jenis Dan Sumber Data*

Data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan sumber data penelitian yang peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan.

Dan adapun data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah antara lain:

1. Data time series dari tahun 2009 sampai tahun 2018 yaitu yang terdiri dari data jumlah pajak kendaraan bermotor, pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan pembatasan periode.
2. Sumber data: Badan Pusat Statistik Kabupaten PolewaliMandardan Kantor SAMSAT Kabupaten Polewali Mandar, Perpustakaan Fakultas Ekonomi, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, maupun *Browsing* di internet serta beberapa sumber referensi yang berkaitan dengan teori-teori yang digunakan.

C. *Metode Pengumpulan Data*

Metode pengumpulan data yang dilakukan merupakan suatu usaha dasar untuk mengumpulkan data dengan prosedur standar. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi ataupun juga studi pustaka, sehingga tidak diperlukan teknik sampling serta kuesioner.

Data yang dapat dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data time series. Data sekunder adalah data yang diperoleh

lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

D. Teknik Analisis Data

Adapun metode untuk menganalisis data dalam penelitian ini yang akan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan model log (log-lin). Dimana model tersebut akan digunakan untuk menganalisa perubahan relative variable dependen (Y) yang disebabkan oleh perubahan absolute dari variable independen (X) dan model ini juga disebut dengan model pertumbuhan. Untuk menguji bisa atau tidak regresi tersebut digunakan dan untuk menguji hipotesis yang dilakukan, maka diperlukan pengujian statistika, adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad \mu \dots \dots \dots (1)$$

Persamaan di atas tidak bersifat linear. Maka untuk mendapatkan hasil regresi yang lebih baik dapat dilakukan transformasi terhadap persamaan menjadi linear dengan menggunakan model log (log-lin) atau model pertumbuhan seperti halnya persamaan berikut:

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e \quad \mu \dots \dots \dots (2)$$

Dimana:

$\ln Y$ = Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor

X_1 = Pendapatan Perkapita

X_2 = Jumlah Kendaraan Bermotor (Roda Dua)

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Parameter yang di estimasi

e_{μ} = Error term

Teknik Pengolahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis Ordinary Least Square (OLS). Uji asumsi klasik terbagi menjadi empat yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah suatu pengujian dalam sebuah model regresi yang dilakukan untuk mengetahui dan menguji bahwa apakah dalam model regresi. Variable terikat (Y) dan variable bebas (X) yang keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati yang normal. Salah satunya metode untuk mengetahui normalitas adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik dengan melihat grafik secara histogram (*Jarque-Bera Test*). *Jarque-Bera Test* merupakan salah satu uji normalitas jenis *goodness of fit test* yang dimana mengukur bahwa apakah derajat ke sistematisan sebuah distribusi sesuai dengan distribusi yang normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara yang tinggi diantara variabel bebas. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel

bebas lainnya. Jadi nilai toleransi rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai *cutoff* yang umum dipakai adalah *tolerance* 0,10 atau sama dengan nilai VIF diatas 10.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji ini bertujuan untuk menguji bahwa apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variable dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak heterokedastisitas. Oleh karena ada beberapa metode uji dari heteroskedastisitas yang dimiliki oleh Eviews, seperti: *Breuch-Pagan-Godfrey*, *Glejser*, *ARCH*, dan *White*. Dalam hal ini penulis menggunakan *White*, untuk uji ini dapat diterapkan sampel yang besar. Keputusan terjadi atau tidaknya heterokedastisitas dalam model regresi linear berganda adalah dengan melihat Nilai Prob. Chi-Squared. Apabila nilai Prob. Chi-Squared hitung lebih besar dari tingkat alfa 0,05 (5%) maka H_0 diterima yang artinya tidak heterokedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob. F hitung lebih kecil dari tingkat alfa 0,05(5%) yang artinya terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Dalam uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji bahwa apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 yang (sebelumnya). Adapun salah satu metode analisis untuk mendeteksi ada atau tidaknya suatu autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian metode *Brusch-Godfrey* atau *LM test (Lagrange Multiplier)*. Dalam uji ini dilakukan dengan cara mencari nilai probability

dari $\text{Obs} \times \text{R-squared}$ dan membandingkan dengan tingkat kesalahan ($\alpha=5\%$), dengan kriterianya.

$H_0: p \geq 0,05$ maka tidak ada sebuah autokolerasi

$H_a: p \leq 0,05$ adanya autokolerasi

Jika $\text{probability} \leq 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, dan juga sebaliknya, apabila $\text{probability} \geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

2. Uji Hipotesis

Uji ini adalah jawaban sementara dari beberapa rumusan masalah dalam suatu penelitian, dimana rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Dan telah dinyatakan ke dalam beberapa bentuk kalimat pertanyaan. Dan adapun uji hipotesis antara lain sebagai berikut:

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini merupakan besaran yang akan menunjukkan besarnya suatu variasi variabel dependen (Y) yang akan dapat dijelaskan oleh variabel independennya (X). Dimana koefisien determinasi tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol (0) dan satu (1), ($0 < R^2 < 1$). Secara sistematis dirumuskan: Jika nilai R^2 (mendekati nol), berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel terikat tidak ada keterkaitan dan sebaliknya Jika nilainya R^2 mendekati 1 (satu), berarti variabel independen (X) memberikan hampir pada semua informasi yang dibutuhkan untuk

memprediksi variabel dependen (Y), maka dapat disimpulkan antara variabel bebas dan variabel terikat ada keterkaitan.

b. Uji F Simultan

Adapun dalam uji ini biasa digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen (X) secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). Dimana jika nilai signifikannya $< 0,05$ atau variabel independen (X) secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Y), yang artinya perubahan yang telah terjadi pada variabel terikat dapat dijelaskan oleh perubahan variabel bebas, yang dimana tingkat signifikansi yang akan digunakan yaitu 0,5%.

c. Uji t Parsial

Dan adapun pada uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa pengaruh secara parsial variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) dan juga mengaggap bahwa variabel dependen (Y) yang lain konstan. Signifikansi tersebut akan dapat di estimasi dengan melihat nilai dari signifikan, apabila signifikan $< 0,05$ maka variabelin dependen (X) secara individu mempengaruhi variabel dependen (Y), dan juga sebaliknya jika nilai dari signifikan $> 0,05$ maka dapat diartikan bahwa variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kabupaten Polewali Mandar*

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat yang berbatasan dengan provinsi lain, yaitu Sulawesi Selatan. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Polewali Mandar berbatasan dengan Kabupaten Mamasa di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah selatan, Kabupaten Majene di sebelah barat dan Kabupaten Pinrang di sebelah timur. Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak antara $3^{\circ}47'83''$ - $3^{\circ}32'3,79''$ Lintang Selatan dan $118^{\circ}53'57,55''$ - $119^{\circ}29'33,31''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar sekitar 2.022,30 km atau 11,94 persen dari luas 2 wilayah Sulawesi Barat.

Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari 16 kecamatan. Yang terbagi dalam daerah pantai, dataran dan pegunungan. Daerah pesisir terdapat di 27 desa (16,16 persen) sedangkan daerah dataran sebanyak 83 desa (49,70 persen).

2. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Polewali Mandar

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah. Laju pertumbuhan penduduk eksponensial menggunakan asumsi bahwa pertumbuhan penduduk berlangsung terus-menerus akibat adanya kelahiran dan kematian di setiap waktu.

Pertumbuhan penduduk yang besar dapat menjadi subjek yang positif untuk menggerakkan perekonomian suatu daerah dengan melalui efektivitas

peningkatan SDM yang berkualitas sebagai tenaga kerja yang mampu menghasilkan kontribusi dalam pendapatan daerah itu sendiri. Berikut data perkembangan penduduk Kabupaten Polewali Mandar.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Polewali Mandar

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Tinambung	24.622
2	Balanipa	25.912
3	Limboro	18.133
4	Tubbi Taramanu	20.543
5	Alu	13.160
6	Campalagian	57.271
7	Luyo	30.133
8	Wonomulyo	49.929
9	Mapilli	29.504
10	Tapango	24.107
11	Matakali	23.628
12	Bulo	9.746
13	Polewali	61.914
14	Binuang	33.065
15	Anreapi	10.376
16	Matangnga	5.619

Sumber: BPS Polewali Mandar, 2020

B. Perkembangan Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berpungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri di lakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Salah satunya berada di Kabupaten Polewali Mandar. Kantor Samsat Polewali sendiri merupakan kantor Samsat ke empat di Sulawesi Barat.

Untuk mengukur jumlah pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana salah satunya adalah jumlah kendaraan bermotor dari daerah tersebut, selain itu pendapatan perkapita menjadi tolak ukur untuk kegiatan pajak. Yang mana penerimaan pajak kendaraan bermotor ini akan di realisasikan ke pendapatan

daerah untuk kemudian digunakan oleh pemerintah sebagai kegiatan dalam menjalankan pembangunan di Kabupaten Polewali Mandar dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Adapun data jumlah pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar

Tahun	Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor
2009	13.989.789.450
2010	15.446.700.136
2011	15.002.367.213
2012	14.987.534.808
2013	15.119.074.078
2014	15.245.827.095
2015	17.566.672.527
2016	16.126.170.079
2017	18.668.979.995
2018	18.870.678.647

Sumber: SAMSAT Polewali Mandar, 2020

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kondisi jumlah pajak kendaraan di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun 2009 hingga 2018, dimana target tertinggi pencapaiannya hanya dengan rata-rata Rp.18.870.678.647 pada tahun 2018 dan terendah di tahun 2009 dengan kisaran Rp.13.989.789.450 juga di tahun 2012 dengan kisaran Rp.14.987.534.808, hal ini

menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar masih belum efektifitas sebagaimana mestinya.

C. Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Polewali Mandar

Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah atau negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDRB per kapita.

Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah, semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

Jumlah PDRB dalam suatu daerah akan menggambarkan kemampuan atau pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut. Semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka akan mempengaruhi kemampuan masyarakat khususnya wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar untuk membayar pajak. Peningkatan kemampuan untuk membayar pajak juga dapat dipicu dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar tinggi maka kemampuan untuk membayar pajakpun semakin besar pula. Sebagaimana di tunjukkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3 Perkembangan Pendapatan Perkapita Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2014-2018**

Tahun	Pendapatan Perkapita
2009	4.234.670
2010	4.939.256
2011	5.405.418
2012	5.885.177
2013	6.311.086
2014	6.772.589
2015	7.255.658
2016	7.797.405
2017	8.356.341
2018	8.878.283

Sumber: BPS Polewali Mandar (data diolah), 2020

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan perkapita di Kabupaten Polewali Mandar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dimana pada tahun 2009 dengan pendapatan terendah yaitu Rp.4.234.670, dan kemudian kembali meningkat pesat hingga mencapai level Rp.8.878.283 di tahun 2018, ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita di Polewali Mandar masih stabil di beberapa tahun walaupun peningkatan rata-ratanya masih tergolong kecil.

D. Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Polewali Mandar

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan tersebut, biasanya digunakan untuk angkutan orang atau barang diatas jalan raya selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor yang dicatat adalah semua jenis kendaraan yang

dikumpulkan berdasarkan metode pendaftaran yang didapat dari Kantor Kepolisian.

Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat akan memberikan dampak terhadap meningkatnya penerimaan terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di kabupaten Polewali Mandar. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti semakin mudahnya proses pembelian kredit kendaraan bermotor serta akan adanya kebutuhan masyarakat untuk transportasi. Adapun data jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2009	32.987
2010	34.621
2011	34.089
2012	36.896
2013	38.989
2014	40.275
2015	41.889
2016	39.860
2017	39.671
2018	40.999

Sumber: Samsat Polewali Mandar, 2020

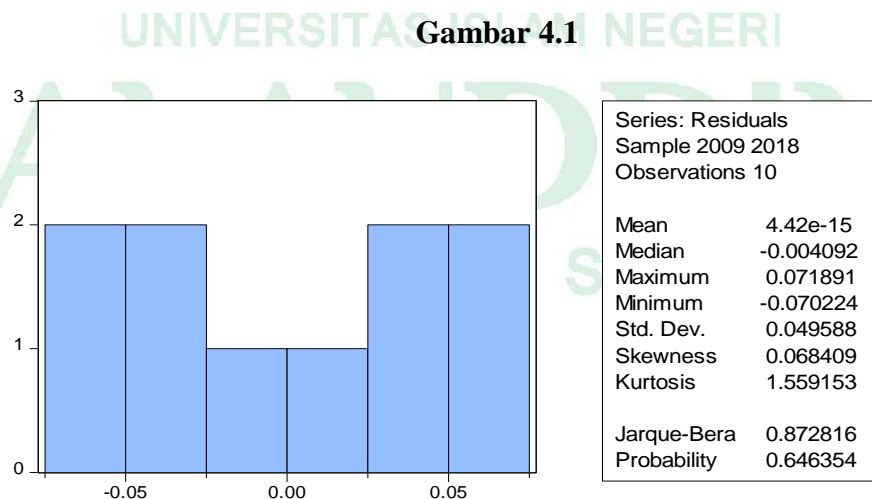
Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor di Polewali Mandar mengalami pertumbuhan fluktuatif. Dimana pertumbuhan jumlah kendaraan terendah terjadi di tahun 2009 dengan angka 32.897 dan tahun 2011 dengan angka 34.089. Adapun peningkatan jumlah kendaraan tertinggi terjadi di tahun 2015 dengan mencapai level 41.889, Kemudian 2 tahun berikutnya kembali mengalami penurunan yaitu di tahun 2016 dan 2017.

E. Hasil Analisis Data

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas di sini yang dimaksudkan adalah dalam hal asumsi klasik pendekatan OLS (Ordinary Least Squares) adalah data residual yang dibentuk oleh model regresi linier tersebut normal, bukan variabel bebas ataupun juga variabel terikatnya. Pengujian terhadap residual tersebut terdistribusi normal atau tidak menggunakan Jarque-Bera Test. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Keputusan terdistribusi normal atau tidaknya residual secara sederhana dengan membandingkan nilai probabilitas JB (Jarque-Bera) hitung dengan tingkat alpha 0,05. Apabila Probability JB hitung lebih besar dari 0,05 maka data tersebut dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan begitupun sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual terdistribusi dengan normal. Nilai Prob.JB hitung sebesar $0,872816 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal, dan hal ini menandakan bahwa asumsi klasik tentang kenormalan telah terpenuhi.

b. Uji Multikolinearitas

Dalam uji ini bertujuan untuk menguji bahwa apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Uji multikolinieritas menggunakan VIF (*Variance Inflation Factors*).

Berdasarkan antara *variance inflation factor* (VIF) dan *tolerance*, maka apabila VIF melebihi angka 10 atau *tolerance* kurang dari 0,10 maka dinyatakan terjadi gejala multikolinieritas. Dan sebaliknya apabila nilai VIF kurang dari 10 atau *tolerance* lebih dari 0,10 maka hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas. Dan adapun hasil dari uji multikolinieritas dapat ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Multikolinieritas

Variabel	Centered VIF
Pendapatan Perkapita	26696.96
Jumlah Kendaraan Bermotor	11304.50

Sumber: Output Views, Tahun 2020

Hal tersebut menunjukkan bahwa uji multikolinearitas pada kolom Centered VIF. Dimana nilai VIF untuk variabel pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor yang keduanya memiliki nilai yang lebih dari 10 atau tolerance lebih dari 0,10 . Maka dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas pada kedua variabel tersebut. Dengan demikian, model diatas tidak terjadi adanya multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Padapola hubungan ini tidak hanya sebatas hubungan yang linear, tetapi dalam pola yang berbeda juga dapat dimungkinkan. Oleh karena itu, ada beberapa metode dari uji heteroskedastisitas yang dimiliki Eviews, antara lain : *Breusch-Godfrey, Harvey, Glejser, Arch, White* dan lainnya. Dalam hal heteroskedastisitas terjadi pada saat residual dan nilai prediksi memiliki korelasi atau pola hubungan. Pada kesempatan ini peneliti menggunakan *White*. Maka adapun hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan Eviews dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
Obs*R-Squared	3.851463	Prob.Chi-Squared (2)	0.4265

Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Untuk melihat keputusan yang terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi linear adalah dengan melihat Nilai Prob.Chi-Squared. Apabila nilai Prob.Chi-Squared hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 maka H_0 diterima yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas, sedangkan apabila nilai Prob.F hitung lebih kecil dari tingkat alpha 0,05 yang artinya terheroskedastisitas.

Dari hasil uji diatas dapat menunjukkan bahwa nilai Prob.Chi-Squared hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 yaitu sebesar 0.4265 maka dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa apakah model regresi linier terbebas dari autokorelasi, dalam hal ini peneliti menggunakan metode *Brush-Godfrey* atau LM (*Lagrange Multiplier*). Dan adapun hasil uji autokorelasi yang ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi

<i>Breuch-Godgofrey Serial Correlation LM Test</i>			
Obs*R-Squared	3.013022	Prob.Chi-Squared (2)	0.2217

Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Pada Uji serial LM Test yang telah menunjukkan bahwa probability = 0.2217 lebih besar dari tingkat alpha 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa pada Hipotesis H_0 diterima artinya tidak terjadi autokorelasi.

2. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis Regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independent dan variabel dependent. Dimana sejumlah variabel independen X_1, X_2, \dots, X_n terhadap sebuah variabel dependen Y .

Persamaan regresi telah ditunjukkan bahwa pada tabel uji *coefisient* berdasarkan output dari Eviews versi 10 terhadap kedua variabel pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Dan adapun hasil dari pengolahan data yang ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Regresi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.23904	1.439302	7.113894	0.0002
Pendapatan Perkapita	0.500841	0.185317	2.702616	0.0305
Jumlah Kendaraan Bermotor	-0.412674	0.519930	-0.793710	0.4534
R-squared	0.762077	Mean dependent var		16.58974
Adjusted R-squared	0.694099	S.D. dependent var		0.101661
Sum squared resid	0.022130	Durbin-Watson stat		2.535427
F-statistic	11.21062			
Prob(F-statistic)	0.006569			
Dependent Variable Y				

Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Berdasarkan pada tabel di atas maka dalam persamaan regresi linear berganda berikut ini:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \mu$$

$$\ln Y = 10.23904 + 0.500841X_1 + -0.412674X_2$$

Dan adapun hasil dari persamaan regresi linear di atas dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Nilai koefisien β_0 adalah sebesar 10.23904, angka tersebut telah menunjukkan bahwa jika Pendapatan Perkapita (X_1) dan Jumlah Kendaraan Bermotor (X_2) nilainya 0 (nol) atau konstan maka tingkat jumlah pajak kendaraan bermotor (Y) nilainya yaitu sebanyak 10.23 %.
- Nilai koefisien (β_1) adalah Pendapatan Perkapita yaitu sebesar 0,50, dan probabilitas sebesar 0,0305 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya jika X_1 (Pendapatan Perkapita) meningkat 1% maka akan menyebabkan peningkatan

terhadap (Y) Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 0,50 % dengan asumsi variabel lain konstan.

- c. Nilai koefisien (β_2) adalah Jumlah Kendaraan Bermotor yaitu sebesar -0,41, dan probabilitas sebesar 0,45 atau lebih besar dari 0,05 yang artinya jika X_2 (Jumlah Kendaraan Bermotor) penurunan sebesar 1% maka akan menyebabkan penurunan pula terhadap Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar sebanyak -0,41 % dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen nilai R square dikatakan baik jika diatas 0,5 karena nilai R square berkisar 0-1.

Dan adapun hasil uji koefisien determinasi yang ditunjukkan pada Tabel berikut:

Tabel 4.9 Uji Koefisien Determinasi

R-squared
0.762077

Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Adapun nilai R-square pada tabel diatas menunjukkan besarnya 0,762077 yang menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor sebesar 76,20%. Yang artinya variasi nilai variabel Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang di jelaskan oleh variasi

nilai variabel independen dalam model yaitu sebesar 76,20% sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

b. Uji F Simultan

Uji statistik F digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara bersama-sama dalam menerangkan variasi variabel terikat. Uji F adalah uji secara simultan yang untuk mengetahui apakah variabel pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor memiliki pengaruh terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor. Maka adapun hasil dari uji simultan dapat tunjukkan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji F (Simultan)

F-statistic	11.21062
Prob(F-statistic)	0.006569

Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Dan adapun hasil dari uji F dapat dilihat pada tabel diatas. Nilai Prob(F-statistic) adalah sebesar 0,006569 lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kedua dari variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat.

c. Uji T Parsial

Dan Dari uji t yang dilakukan untuk mengetahui secara parsial pengaruh variabel Pendapatan Perkapita (X1) dan Jumlah Kendaraan Bermotor (X2) terhadap Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (Y) di Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11 Uji T Statistic

Variable	Coefficient	Prob	Keterangan
C	10.23904	0.0002	-
Pendapatan Perkapita	0.500841	0.0305	Signifikan
Jumlah Kendaraan Bermotor	-0.412674	0.4534	Tidak Signifikan

Sumber: Output Eviews, Tahun 2020

Maka dapat dijelaskan Hasil uji t pada tabel di atas. Apabila nilai probabilitas hitung yang ditunjukkan pada $Prob < 0,05$ maka dapat dinyatakan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Variabel Pendapatan Perkapita memiliki probabilitas $< 0,05$ yang artinya variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Jumlah pajak kendaraan bermotor dan jumlah kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar karena $Prob > 0,05$.

Adapun hasil uji hipotesis variable-variabel independen yang secara parsial terhadap variabel dependen dapat dianalisis, adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Pendapatan Perkapita (X_1) memiliki nilai signifikan $< \alpha$ ($0,0305 < 0,05$) dengan nilai β_1 sebesar 0.500841. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika variabel pendapatan perkapita (X_1) meningkat sebesar 1% dimana variabel lain konstan, maka jumlah pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebanyak 0,50% serta mempunyai pengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Jumlah Pajak Kendaraan

Variabel Jumlah Kendaraan Bermotor (X_2) memiliki nilai signifikan $<\alpha$ ($0,4534 < 0,05$) dengan nilai β_2 sebesar $-0,412674$. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jika variabel jumlah kendaraan bermotor (X_2) meningkat sebesar -1% dimana variabel lain konstan, maka jumlah pajak kendaraan bermotor akan menurun sebanyak $-0,41\%$ dan tidak mempunyai pengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.

F. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Pendapatan Perkapita berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Dimana variabel Pendapatan Perkapita memiliki nilai signifikan ($0,0305 < 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar $0,500841$. Sehingga semakin bertambahnya tingkat pendapatan perkapita maka jumlah pajak kendaraan bermotor juga akan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil regresi, hal ini sesuai dengan hipotesis awal bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.

Dari peningkatan pendapatan perkapita menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita maka kemampuan pemasukan atau daya beli

masyarakat akan meningkat, yang artinya kemampuan masyarakat untuk membayar pajak juga akan semakin meningkat karena adanya pendapatan yang lebih. Hal ini kemudian akan memberikan dampak positif terhadap pemasukan pemerintah dari segi pajak untuk meningkatkan kesejahteraan daerah itu sendiri. Artinya bahwa dengan bertambahnya pendapatan rata-rata masyarakat akan tentu meningkatkan pengeluaran masyarakat itu sendiri hal ini terjadi karena adanya pertambahan pendapatan sehingga masyarakat akan memaksimalkan tingkat konsumsi seperti contoh masyarakat mampu membayar pajak sesuai hak wajib pajak yang dimilikinya.

Namun jika pendapatan masyarakat yang rendah tentu akan sulit membayar pajak dan cenderung membebani masyarakat yang memiliki pendapatan yang sedikit. sebab, masyarakat yang ada pada golongan pendapatan yang rendah hanya mampu untuk menggunakan pendapatannya untuk keperluan primer saja. hal ini di dukung oleh teori (Isawati, Soegiarto, Ruliana, 2015) bahwa Pemungutan pajak perlu memperhatikan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, kemampuan membayar itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, oleh karena itu pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang.

Dengan adanya pertambahan pendapatan perkapita maka akan berpengaruh juga kepada hasil penerimaan pajak daerah yang cenderung ikut mengalami peningkatan khususnya pajak kendaraan bermotor. Alasannya ialah karena adanya pendapatan yang lebih sehingga masyarakat mau menggunakan pendapatan yang dimilikinya untuk menunaikan kewajiban pajaknya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ariasih,dkk (2010) bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PKB dan BBNKB.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nita Darma Sari (2005) pendapatan perkapita dan jumlah kendaraan bermotor secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor Terhadap Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel Jumlah Kendaraan Bermotortidak berpengaruh signifikan terhadapjumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar. Angka variabel jumlah kendaraan bermotor memiliki nilai tingkat signifikan ($0,4534 < 0,05$) dengan nilai koefisien sebesar -0.412674. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal bahwa variabel jumlah kendaraan bermotor berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor.

Adanya jumlah kendaraan bermotor yang tidak berpengaruh terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar di sebabkan karena beberapa kalangan masyarakat (pelaku wajib pajak) yang tidak menunaikan kewajibanya dalam membayar pajak, yang tentunya hal ini akan mempengaruhi kewajiban pemerintah dalam membiayai sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang selanjutnya kemudian akan menghambat laju pembangunan di daerah tersebut. Jika laju pertumbuhan penerimaan pajak kendaraan bermotor meningkat maka dapat dikatakan bahwa sebuah pemerintahan

melakukan tugasnya dengan baik. Alasan lain mengapa jumlah kendaraan tidak berpengaruh terhadap jumlah pajak salah satu yaitu karena kondisi geografi dan demografi Kabupaten Polewali Mandar, dimana masih banyak masyarakat yang tinggal jauh dari jalan utama atau tinggal di pedalaman. Hal ini membuat masyarakat tidak memandang penting untuk membayar pajak, malah menganggap bahwa membayar pajak itu hanya buang-buang uang, padahal kendaraan yang dimiliki hanya dipake di daerah sekitar desa, yang dimana belum bisa merasakan pembangunan infrastruktur yang memadai di pedalaman desa itu sendiri dan juga tentu tidak pernah diadakan razia kendaraan.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan pelaku wajib pajak (pemilik kendaraan bermotor) sehingga tidak melakukan kewajiban pajak, antara lain:

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dalam membayar pajak. Fakta dilapangan membenarkan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten polewali mandar belum menyadari pentingnya pajak itu sendiri, hal ini kemudian menjadi dasar dari beberapa wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban tersebut.

2. Kurangnya sosialisasi tentang perpajakan di kabupaten Polewali Mandar.

Samsat beserta dinas pendapatan daerah kurang mengsosialisasikan tentang perpajakan, hal ini khususnya bagi yang jauh dari daerah perkotaan yang masih belum mengetahui penting dan manfaat dari perpajakan itu sendiri.

3. Kurangnya ketegasan aparatur pajak dalam menyikapi wajib pajak yang melakukan berbagai pelanggaran pajak.

Selain itu, yang menjadi penyebab tidak berpengaruhnya jumlah kendaraan bermotor (roda dua) terhadap jumlah pajak di Kabupaten Polewali Mandar yaitu dari unit jumlah kendaraan bermotor itu sendiri yang mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir sehingga berkurangnya unit kendaraan bermotor ini juga menyebabkan menurunnya jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Natalia (2017) jumlah sepeda motor berpengaruh negatif terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya dalam membayar pajak yang mengakibatkan.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian dari Ratnasari (2016) dimana jumlah kendaraan motor berpengaruh negatif terhadap jumlah penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijelaskan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut:

1. Pendapatan perkapita (X1) berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Jumlah kendaraan bermotor (X2) tidak signifikan terhadap jumlah pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah ada, maka beberapa saran yang dapat diajukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan jumlah pajak diharapkan pemerintah maupun aparat pajak di Kabupaten Polewali Mandar lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.
2. Perlu dilakukan terobosan baru dalam hal fasilitas misalnya penyediaan mobil samsat keliling untuk menjangkau masyarakat yang ada di pegunungan dalam membayar pajak kendaraan sehingga wajib pajak yang menunggak bisa teratasi. Dan bagi masyarakat diharapkan untuk lebih meningkatkan akan kesadaran tentang pentingnya membayar pajak yang hal ini untuk pemasukan belanja pemerintah sebagai dana pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar.

3. Bagi penelitiatan akademisi berikutnya diharapkan agar lebih dapat mengembangkan penelitian mengenai pajak di Kabupaten Polewali Mandar serta penelitian ini dapat di jadikan sumber referensi yang bermanfaat untuk ke depannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, P. (2009). *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aryobimo, T. (2012). Pengaruh persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko sebagai variable moderating (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang). *Jurnal Of Accounting*, 1-2.
- Basu Swastha, H. H. (2011). *Manajemen pemasaran-analisis perilaku konsumen*. Yogyakarta: BPFE.
- Chariri. (2007). *Teori Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Husain, U. (2001). *Metode Penelitian dan Aplikasi dalam Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Hutagol, J. (2007). *Perpajakan isu-isu Kontemporer*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nasution, H. (1995). *Islam Rasional*. Bandung: Mizan.

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Saidi, M. D. (2011). *“Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri.

Sugiyanto, D. C. (2014). teori kepuasan dan perilaku konsumen. *Journal Economics*, 17.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunyoto, D. (2014). *Praktik Riset Perilaku Konsumen Teori, Kuesioner, Alat, dan Analisis Data*. Yogyakarta: CAPS.

Tamba, H. (2001). *Koperasi : Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

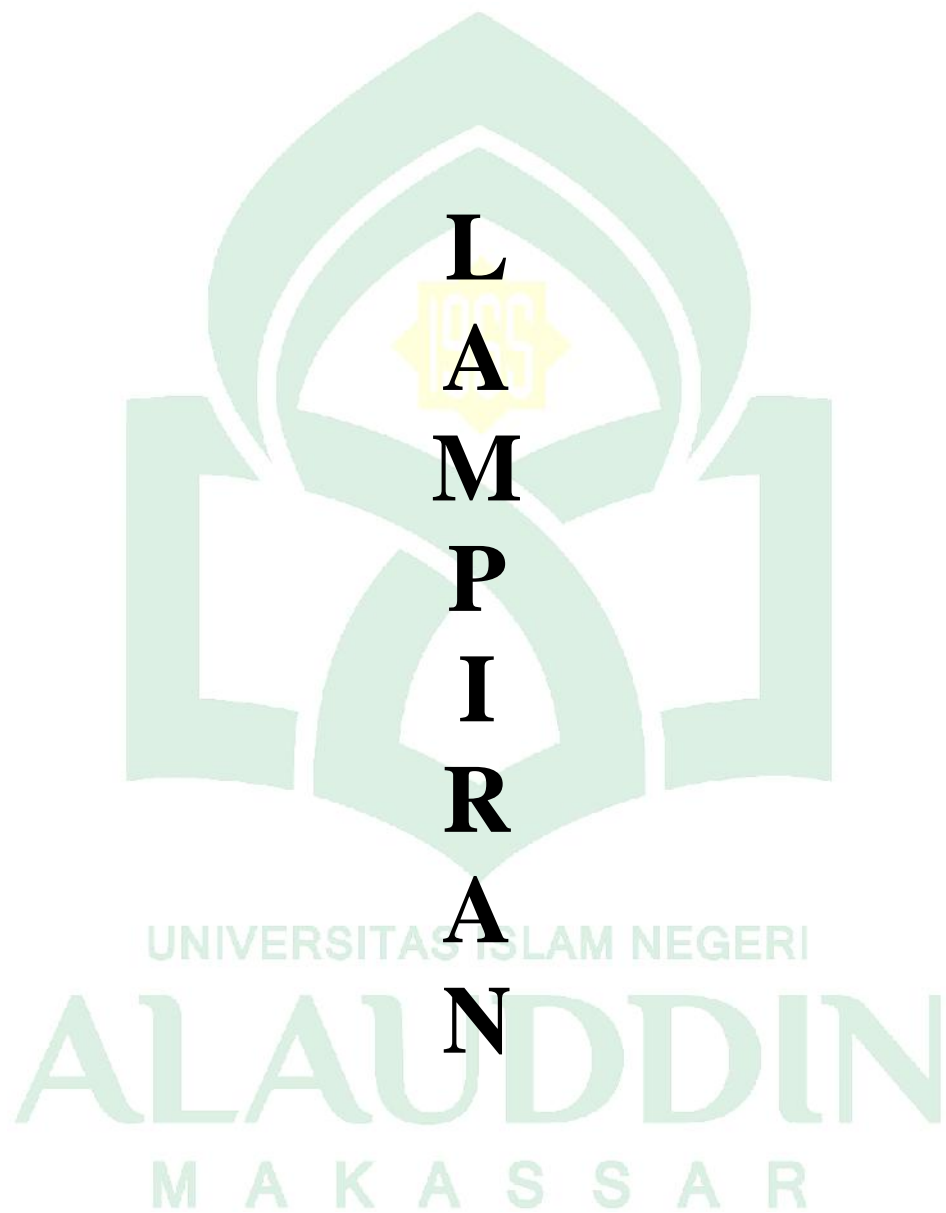
W.O Aswati, T. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak , pengetahuan pajak dan Akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Skripsi*, 13.

Waraouw Sondakh, W. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan”. *Jurnal EMBA*, 4.

Y.A Siregar, S. S. (2012). Pengaruh pelayanan fiskus dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1-9.

Yunanto. (2011). Intellectual Capital Disclosure dan karakteristik pemerintah di Indonesia. *Tesis FE Universitas Sebelas Maret*.





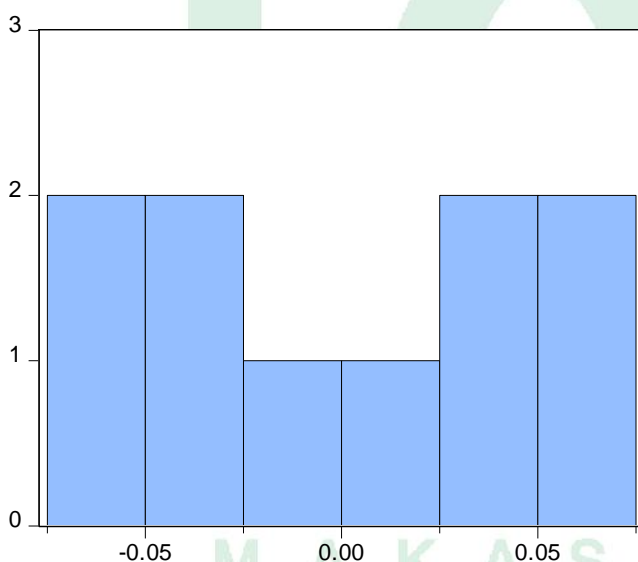
**L
A
M
P
I
R
A
N**

Hasil uji regresi

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 02/19/20 Time: 09:43
Sample: 2009 2018
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	10.23904	1.439302	7.113894	0.0002
X1	0.500841	0.185317	2.702616	0.0305
X2	-0.412674	0.519930	-0.793710	0.4534
R-squared	0.762077	Mean dependent var		16.58974
Adjusted R-squared	0.694099	S.D. dependent var		0.101661
S.E. of regression	0.056227	Akaike info criterion		-2.675515
Sum squared resid	0.022130	Schwarz criterion		-2.584740
Log likelihood	16.37758	Hannan-Quinn criter.		-2.775096
F-statistic	11.21062	Durbin-Watson stat		2.535427
Prob(F-statistic)	0.006569			

Ujinnormalitas



Series: Residuals	
Sample 2009 2018	
Observations 10	
Mean	4.42e-15
Median	-0.004092
Maximum	0.071891
Minimum	-0.070224
Std. Dev.	0.049588
Skewness	0.068409
Kurtosis	1.559153
Jarque-Bera	0.872816
Probability	0.646354

Uji Hetero

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.783004	Prob. F(4,5)	0.5819
Obs*R-squared	3.851463	Prob. Chi-Square(4)	0.4265
Scaled explained SS	0.527622	Prob. Chi-Square(4)	0.9708

Test Equation:

Dependent Variable: RESID²

Method: Least Squares

Date: 02/19/20 Time: 09:48

Sample: 2009 2018

Included observations: 10

Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.689985	3.238199	-0.213077	0.8397
X1 ²	0.002264	0.025879	0.087485	0.9337
X1*X2	-0.044687	0.171894	-0.259970	0.8053
X1	0.087538	0.413597	0.211650	0.8407
X2 ²	0.099141	0.369942	0.267991	0.7994

uji auto

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.078085	Prob. F(2,5)	0.4081
Obs*R-squared	3.013022	Prob. Chi-Square(2)	0.2217

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 02/19/20 Time: 09:53

Sample: 2009 2018

Included observations: 10

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.662871	1.493405	-0.443865	0.6757
X1	0.353729	0.315797	1.120114	0.3136
X2	-1.346117	1.120043	-1.201843	0.2832
RESID(-1)	-1.262822	0.873206	-1.446190	0.2078
RESID(-2)	-0.975930	0.884041	-1.103943	0.3199

Uji Multi

Variance Inflation Factors

Date: 02/19/20 Time: 09:57

Sample: 2009 2018

Included observations: 10

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.071591	6552.612	NA
X1	0.034342	26696.96	5.535072
X2	0.270327	11304.50	5.535072

logaritma

y	x1	x2
16.4538383	15.25881604	3.496114
16.55290597	15.41272526	3.54446
16.52371856	15.50291241	3.528975
16.52272941	15.58794739	3.608103
16.53146768	15.65781836	3.66328
16.53981639	15.72839401	3.695731
16.68151406	15.79729218	3.735023
16.59595398	15.86930159	3.685373
16.74237388	15.93853121	3.68062
16.75311988	15.99911877	3.713548

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 88 TAHUN 2020

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n. Anjas Asmara, NIM : 90300115134
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Anjas Asmara**, NIM: **90300115134** tertanggal 27 Desember 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: "**Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Roda Dua) di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar**".
- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dari penyusunan skripsi
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama
6. RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Amiruddin K, M.EI.
Pembimbing : Dr. Stradjuddin, SE., M.Si.
Pembimbing II : Bahrul Ulum Rusydi, SE., M.Si.
Penguji I : Dr. Hasbiullah, SE., M.Si.
Penguji II : Sih Aisyah, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Roshani
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 14 Januari 2020

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 815 TAHUN 2020**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Anjas Asmara, NIM : 90300115134
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Anjas Asmara, NIM: 90300115134** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Amiruddin K, M.El.
Pembimbing : Dr. Siradjuddin K, SE., M.Si.
Pembimbing II : Bahrul Ulum Rusydi, SE., M.Si.
Penguji I : Dr. Hasbiullah, SE., M.Si.
Penguji II : Siti Aisyah, S. Ag., M. Ag.
Pelaksana : Nuraeni Hafid

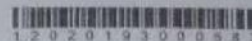
1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dari kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 9 Maret 2020
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 669/S.01/PTSP/2020
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Sulawesi Barat

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 758/EB.I/PP.00.9/1/2020 tanggal 31 Januari 2020 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ANJAS ASMARA**
Nomor Pokok : 90300115134
Program Studi : Ilmu Ekonomi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sit Alauddin No. 63, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" DETERMINAN JUMLAH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (RODA DUA) DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR "

Yang akan dilaksanakan dari Tgl. 05 Februari s/d 05 Maret 2020

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 04 Februari 2020

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Sekretaris Administrasi Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Terbacaan Yth
1. Dekan Fak. Ekonomi & Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Peringgal.

SMAAF PTSP 04-02-2020



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
Website : <http://aimap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231



2. Penelitian tidak Menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian Kepada Gubernur Sulawesi Barat, Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Barat.
5. Surat izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Mamuju
Pada Tanggal 11 Februari 2020

a.n. GUBERNUR SULAWESI BARAT
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI SULAWESI BARAT,
Selaku Administrator Pelayanan Terpadu
Satu Pintu



H. BAHTIAR HS, SE, MH
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19620707 199208 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Kesbang dan Politik Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Polewali Mandar di Polewali;
3. Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
6. Kepala Samsat Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
7. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
8. Pertinggal;

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anjas Asmara, lahir di Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, pada tanggal 08 April 1996, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Peneliti lahir dari buah cinta pasangan Sarman BW dan Masturi. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 030 Binuang

Kecamatan Binuang dan lanjut (pindah) ke SDN 007 Lantora Kecamatan Polewali (lulus tahun 2009), kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 2 Polewali (lulus pada tahun 2012) dan pendidikan pada jenjang sekolah menengah atas di SMAN 2 Polewali (lulus tahun 2015) hingga akhirnya penulis bisa menempuh kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Makassar untuk program strata 1 pada tahun 2015 hingga 2020.

Penulis juga aktif dalam organisasi dari Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar (KPMPM-Pusat), Kesatuan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar cabang Binuang (KPMPM Cab.Binuang) dan Ikatan Alumni SMAN 2 Polewali cabang Makassar (IKA SMADA Cab.Makassar).